

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi memunculkan suatu fenomena baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia yaitu dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi, tegaknya supremasi hukum, penataan ulang pemerintahan serta reformasi sistem administrasi publik (Afiyah. 2009). Hal tersebut dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui suatu inovasi sistem akuntansi. (Bastian, 2007:2)

Saat ini Organisasi sektor publik termasuk pemerintah dihadapkan dengan tekanan untuk menjadi lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian saat ini akuntansi sektor publik sedang

mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah. Dalam menjalankan sistem informasi akuntansi ini harus dibarengi dengan teknologi informasi yang memadai serta sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan. Ini sangat terkait dengan kompetensi yang terdiri atas pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, serta faktor etika para pelaku sehingga dapat memenuhi tujuan penganggaran dan lebih luasnya formulasi kebijakan fiskal yang berorientasi kepada publik (Afiyah, 2009).

Aparatur daerah berperan menyusun anggaran dan menjalankannya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dalam menyusun dan menggunakan anggaran ada sistem didalamnya yaitu sistem akuntansi. Sehingga, berjalannya sistem itu diukur dari kompetensi pelaksana dan pemahamannya terhadap sistem itu sendiri serta bagaimana pemerintah menjadikan sistem itu menjadi suatu informasi yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya.

Sistem informasi akuntansi lebih difokuskan pada penggunaan komputer dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi, penyediaan informasi keuangan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi. Diterapkannya sistem informasi akuntansi ini oleh pemerintah diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya ketidakakuratan dalam penyediaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya keterlambatan dalam memberikan pelayanan serta pelaporan keuangan. Pada akhirnya, sistem informasi akuntansi akan menghasilkan output berupa pelaporan keuangan yang dalam hal ini pelaporan keuangan daerah yang dapat mencerminkan kinerja keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Dalam menyusun laporan keuangan ada sistem yang diciptakan untuk mengaturnya. Sistem itu sendiri adalah sistem akuntansi. Sistem ini diciptakan agar nantinya terciptalah suatu informasi yang berupa laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja dari suatu daerah. Sistem informasi akuntansi ini juga sangat berperan penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berpernyataan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berarti Pemerintah tersebut telah mampu menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam organisasi sektor publik sistem informasi yang didukung teknologi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif, seperti sistem yang terkomputerisasi. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, maka hal ini akan mampu meminimalisasikan ketidakakuratan dalam melakukan pencatatan ataupun

penjurnalan. Tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan juga diharapkan dapat tercapai setelah terciptanya sistem informasi akuntansi tersebut.

Hasil temuan analisis diagnostic Departemen Dalam Negeri (2002), menemukan adanya gejala yang berkaitan dengan profesionalisme aparatur birokrasi, salah satunya adalah sumber daya aparatur pemerintahan daerah belum mempunyai pengalaman memadai dan kurang profesional dan jauh dari memuaskan untuk menangani isu-isu otonomi daerah. (Liestyodono.2008)

Sampai dengan saat ini, penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah itu masih jauh dari memuaskan. Penyebab buruknya kinerja Pemerintah Daerah kemungkinan dikarenakan oleh kompetensi yang masih kurang dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintahan daerah atau juga sistem informasi akuntansi yang dijalankan tidak dibarengi dengan perangkat memadai yang mendukungnya. Apabila hal tersebut yang terjadi, maka akan sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerahnya menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Maka dari itu, laporan keuangan yang nantinya akan disusun serta kandungan nilai informasi didalamnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kompetensi pihak yang terlibat serta pemahaman terhadap keseluruhan sistem itu sendiri dalam menggunakan sistem informasi akuntansi.

Penelitian ini sendiri merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Nunuy Nur Afiah (2009), penelitian dilaksanakan pada Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan kepala pemerintahan dan anggota DPRD setiap

Kabupaten/Kota sebagai sampel. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan sampel yang berbeda dengan replikasinya yaitu dengan menggunakan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau Sekretaris/Kepala Tata Usaha selaku PKPA (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran) pada setiap SKPD pemerintahan kota Padangsidempuan sebagai sampel serta menambahkan variabel pemahaman sistem informasi akuntansi. Alasan dilakukan penelitian pada pemerintahan Kota Padangsidempuan seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya yaitu LKPD Kota Padangsidempuan Tahun 2010 yang diberikan opini Wajar Dengan Pengencualian (sumber: [BPK](#), 2011). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul “ **Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada SKPD Kota Padangsidempuan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur daerah berpengaruh terhadap penilaian laporan keuangan?
2. Apakah sistem informasi akuntansi di daerah telah terkomputerisasi secara baik?
3. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi?

4. Apakah pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi?
5. Apakah kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk melihat kompetensi aparatur daerah dan pemahamannya terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang pengaruh kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan pada SKPD Pemerintahan Kota Padangsidimpuan.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi aparatur daerah berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada SKPD Kota Padangsidimpuan?
2. Apakah pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada SKPD Kota Padangsidimpuan?
3. Apakah kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi pada SKPD Kota Padangsidimpuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada SKPD Kota Padangsidimpuan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.